



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Perangkat Daerah terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan KUA-PPAS sampai kepada penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Perangkat Daerah ini dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya.

Kuala Tungkal, Juli 2022

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SOFIAN KADRY, S.Kom.M.Si

Pembina

NIP.19870525 201001 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO	8
2.1 Visi dan Misi	8
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Strategi dan Kebijakan	14
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021.....	17
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	17
3.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	29
3.3 Analisis Pelaksanaan Pelayanan Diskominfo	38
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	40
BAB VII PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pelayanan Pelayanan Jangkah Menegah Diskominfo	13
Tabel 2.3.	Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	16
Tabel 3.1	Evaluasi Renja Tahun Lalu	20
Tabel 3.2	Evaluasi Renja Tahun Berjalan (Tahun 2021)	30
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran sampai Tahun Anggaran 2021	32
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo .	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Awal perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dimulai dengan persiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam Rancangan Akhir Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rancangan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan didalam Rancangan Akhir Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Awal Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUAPPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan prakiraan maju Tahun 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Diskominfo;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika KabupatenTanjung Jabung Barat;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan melalui focus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 3.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Strategi dan Kebijakan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan Tahun 2021

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Rencana Program
- 4.2 Rencana Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II

PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

2.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengembangan teknologi informasi merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

VISI.

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Terintegrasi dengan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Tersedianya jaringan yang lebih luas berupa WAN dan LAN (Internet dan Intranet) pada SKPD yang prioritas di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang handal, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasana teknologi informasi berbasis website, audio dan visual dengan dukungan dana yang memadai.

MISI.

Untuk dapat merealisasikan visi terwujudnya pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Telah menetapkan misi sebagai langkah atau strategi untuk mencapai visi tersebut.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Mewujudkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
- b. Mewujudkan penyediaan jaringan interkoneksi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Meningkatkan layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan dukungan pendanaan yang memadai.
- e. Meningkatkan diseminasi data statistik sektoral dan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- f. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengelolasisistem yang berada dilingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat, berupa pengadministrasian computer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dengan mempersiapkan jaringandalam menjalankan aplikasi serta Meningkatkan literasi (kemampuan) dan profesionalisme Kinerja Kelembagaan adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan fungsi dan peran perangkat kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan kewenangan dan kondisi daerah dalam rangka

peningkatan Kinerja Pemerintah dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi sistem administrasi pemerintah menuju terwujudnya E-Government (tata kelola pemerintah berbasis elektronik).

2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah, guna memudahkan user melakukan komunikasi dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi berupa aplikasi yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan di OPD sehingga data dapat terangkum secara terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dan dapat memanfaatkan fasilitas jaringan internet/intranet serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya untuk meningkatkan pelayanan informasi multi media kepada publik yang terprogram, akuntabel melalui website Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai perwujudan penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dan meningkatkan kerjasama, kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa.
4. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan

Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum.

MOTTO

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

“KOMUNIKASI INFORMASI TERARAH CEPAT DAN AKURAT”

2.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut: Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus

memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	TUJUAN	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Inforamasi Publik	1. Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik	100%
			2. IKM Layanan Website Tanjab Barat	75%
		Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi	3. Persentase Pemanfaatan Hosting dan Collocation	85%
			4. Persentase OPD yg memiliki aplikasi E-Government	97%
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Meningktanya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	5. Persentase rilis data yang akurat dan tepat waktu	90%
			6. Persentase layanan keamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	90%

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
- c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi publik
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
- h. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Meningkatkan pengawasan menara telekomunikasi .
- d. Membangun system layanan informasi publik
- e. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- g. Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapane-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- h. Menigkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK.

Hubungan hirarkis antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Inforamasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan Menyelenggarakan system pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system Layanan Informasi Publik - Menyelenggaran penilaian dan pembinaan kelompok masyarakat berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik - Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik - Melaksanakan penyelenggaran layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Menigkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas</p>	<p>Meningktanya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Saluran Komunikasi Data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Renja 2021)

Secara garis besar sesuai tugas dan fungsi Diskominfo, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru berjalan hampir 4 (empat) Tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk pada akhir tahun 2016 dan baru memulai ditahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu (Tahun 2020) dan evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan (renja 2021) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan (renja 2021) sebagai bahan dan acuan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
2. Pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
3. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Realisasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 4 Januari s.d 30 September 2021

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab							
							I		II		III		IV					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2020)	13 = 6 + 12	14 + 13/5 x 100%				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas kinerja aparatur dan Keuangan	2 1 0 2.01 . 6 1 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	99 %		10 0%		10 0%		14, 74 %		41, 73 %		60, 43 %		0,0 0%		116, 90%		108, 45%		109, 54%	147, 43%	Diskominfo
				4.504.833.720	864.603.432	4.941.760.169	728.508.227	2.062.032.672	2.986.185.505		5.776.726.404	6.641.329.836												
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	61.920.000		3	15.450.000		3	24.525.000		38.675.000		3	78.650.000	3	5,00 %	127,02%					Diskominfo

2	1	0	2.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedia a dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	60	61.920.000			12	3	0	0	38.675.000			3	3	78.650.000	78.650.000	5,00 %	127,02%	Disko minfo
2	1	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60	3.592.837.700			12	3		0	2.518.271.524			3	3	4.829.522.774	4.829.522.774	5,00 %	134,42%	Disko minfo
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia a Gaji dan Tunjangan ASN	60	3.405.647.700			12	3		0	2.385.681.524			3	3	4.564.642.774	4.564.642.774	5,00 %	134,03%	Disko minfo
2	1	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedia a jasa administrasi keuangan	60	141.340.000			12	3		0	104.690.000			3	3	209.080.000	209.080.000	5,00 %	147,93%	Disko minfo
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedia a laporan capaian kinerja program dan kegiatan	60	45.850.000			12	3		0	27.900.000			3	3	55.800.000	55.800.000	5,00 %	121,70%	Disko minfo
2	1	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedian ya pelayanan administrasi perkantoran	60	535.787.055			12	3		0	225.043.936			3	3	445.848.056	445.848.056	5,00 %	83,21%	Disko minfo
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayam ya Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	12	3.044.106			3	3		0	961.925			3	3	1.923.850	1.923.850	25,00 %	63,20%	Disko minfo

2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	51	25.000.027			51	25.000.027	12	-	13.222.000	0	13.222.000	12	26.444.000	12	26.444.000	23,53%	105,78%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	18.200.000			12	18.200.000	3	-	-	0	-	3	-	3	-	25,00%	0,00%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	21.926.922	12	27.706.360	12	21.926.922	3	960.000	2.557.500	0	10.182.000	3	13.699.500	15	41.405.860	125,00%	188,84%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	6.000.000	60	30.792.072	12	6.000.000	3	-	800.000	0	800.000	4	1.600.000	64	32.392.072	533,33%	539,87%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12	461.616.000	12	720.680.000	12	461.616.000	12	72.414.784	129.887.911	0	199.878.011	17	402.180.706	29	1.122.860.706	241,67%	243,25%	Disko minfo
2	1	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60	105.361.265				105.361.265		23.627.593	47.801.587	0	68.943.136	0	140.372.316	0	140.372.316	0,00%	133,23%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		67	2.850.000	65	1.425.000	67	2.850.000	0	-	-	0	282.000	1	282.000	651	1.707.000	96,44%	59,89%	Disko minfo
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	72.000.000	12	84.000.000	12	72.000.000	4	16.877.593	32.842.137	0	46.951.686	4	96.671.416	16	180.671.416	133,33%	250,93%	Disko minfo

2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12			12	3	1	0	21.709.450	14.959.450		4	4	43.418.900	43.418.900	33,33%	142,30%	Disko minfo	
.	6	.	08	4			30.511.265			30.511.265	6.750.000			14.959.450				43.418.900						
2	1	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60										0	0	43.418.900	282.333.258	0,00%	135,13%	Disko minfo	
.	6	.					208.927.700			208.927.700	46.865.240			100.216.109	135.251.909			282.333.258						
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Kegiatan Organisasi	12	12	12	12	3			0,00%			3	7,5	214.213.258	403.463.258	62,50%	299,19%	Disko minfo	
.	6	.	09	1			134.850.000	189.250.000	134.850.000	35.485.240			76.671.109	102.056.909				214.213.258						
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	12	12	12	12	3			0,00%			3	7,5	14.120.000	14.120.000	62,50%	50,28%	Disko minfo	
.	6	.	09	1			28.081.700		28.081.700	2.380.000			5.545.000	6.195.000				14.120.000						
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	12	12	12	12	3			0,00%			3	7,5	54.000.000	54.000.000	62,50%	117,40%	Disko minfo	
.	6	.	09	1			45.996.000		45.996.000	9.000.000			18.000.000	27.000.000				54.000.000						
2	1	0			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		99%	100%	100%	8,05%	47,12%	80,27%	0,00%	135,44%	117,72%	118,91%	135,44%	3.175.920.000	3.175.920.000	118,91%	135,44%	Disko minfo		
.	6	.					2.344.899.850		2.344.899.850	188.800.000			1.104.950.000	1.882.170.000				3.175.920.000						

	2	1	0	2.01				99%		10%		10%	8,05%		47,12%	80,27%	0,00%		135,44%		117,72%	3.175.920.000	118,91%	135,44%	Disko minfo
	.	6	.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.344.899.850				2.344.899.850		188.800.000	1.104.950.000	1.882.170.000			3.175.920.000		3.175.920.000			
	2	1	0	2.0	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	terbangunnya citra pemerintah kabupaten tanjung jabung barat melalui opini publik		100%				100%	0		0	0			0	0	0	65.700.000	0,00%	143,22%	Disko minfo
	.	6	.	01					45.875.000				45.875.000		10.950.000	21.900.000	32.850.000			65.700.000		65.700.000			
	2	1	0	2.0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran		4				4	1			0			1	1	57.600.000	57.600.000	25,00%	146,01%	Disko minfo
	.	6	.	01					39.450.000				39.450.000		9.600.000	19.200.000	28.800.000			57.600.000		57.600.000			
	2	1	0	2.0	Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik		1				1	0						0	0	60.750.000	60.750.000	0,00%	136,57%	Disko minfo
	.	6	.	01					44.484.000				44.484.000		6.750.000	21.600.000	32.400.000			60.750.000		60.750.000			
	2	1	0	2.0	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Layanan Hubungan Media		3				3	0						0	0	2.744.100.000	2.744.100.000	0,00%	145,13%	Disko minfo
	.	6	.	01					1.890.800.000				1.890.800.000		152.800.000	965.700.000	1.625.600.000			2.744.100.000		2.744.100.000			
	2	1	0	2.0	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik		3				3	0						0	0	247.770.000	247.770.000	0,00%	76,40%	Disko minfo
	.	6	.	01					324.290.850				324.290.850		8.700.000	76.550.000	162.520.000			247.770.000		247.770.000			

	2	1	0			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		10 0%			10 0%	4,0 1%	27, 91%	0	0,0 0%	31,9 2%	31,9 2%	1.692.826.094	31,9 2%	87%	Disko minfo
									1.938.090.000			1.938.090.000	77.719.970	540.844.970	1.074.261.154			1.692.826.094			
	2	1	0	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10 0%			10 0%	4,0 1%	27, 91%	0	0,0 0%	31,9 2%	31,9 2%	1.692.826.094	31,9 2%	87%	Disko minfo
									1.938.090.000			1.938.090.000	77.719.970	540.844.970	1.074.261.154			1.692.826.094			
	2	1	0	2.02	0	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	44			44	11	0	0	-	62	62	60.100.000	140,91%	128,28%	Disko minfo
									46.850.000			46.850.000	9.525.000	19.050.000	31.525.000			60.100.000			
	2	1	0	2.02	0	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi	105			105	26	0	0		26	26	1.277.550.000	24,76%	79,04%	Disko minfo
									1.616.340.000			1.616.340.000	23.475.000	423.800.000	830.275.000			1.277.550.000			
	2	1	0	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		9			9	3		0		3	3	79.635.000	33,33%	129,07%	Disko minfo
									61.700.000			61.700.000	11.025.000	22.050.000	46.560.000			79.635.000			
	2	1	0	2.02	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3			3	1	4	0		5	5	63.601.094	166,67%	133,34%	Disko minfo
									47.700.000			47.700.000	10.594.970	20.944.970	32.061.154			63.601.094			
	2	1	0	2.02	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	12			12	3		0		3	3	122.840.000	25,00%	123,96%	Disko minfo
									99.100.000			99.100.000	8.250.000	25.300.000	89.290.000			122.840.000			

2	1	0	2	1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersediany a Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44			44		11			0			11		11		25,0 0%	134, 19%	Disko minfo
							66.400.000			66.400.000		14.850.000			29.700.000			44.550.000		89.100.000		89.100.000		
																		94,7						
																		5%						
																		Baik						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																								

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Renja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri 8 (Delapan) program kerja dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan, target kinerja sampai dengan 30 September 2021 terealisasi 94,75 persen, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diserap secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpu dan kapabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan bulan Oktober tahun anggaran 2021 telah mencapai target keluaran dengan tingkat pencapaian realisasi kinerja sebesar 76,65% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.735.589.236,- dari total anggaran 8.787.823.570,- atau 76,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai bulan Oktober tahun 2021 baik.

Alokasi dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 sebesar **Rp. 8.787.823.570,-** yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.532.367.700,-**realisasi anggaran sampai triwulan ke IV (Oktober 2021) sebesar Rp.**2.725.943.814,-** atau **77,17%**, dengan target realisasi Kinerja sebesar **100 %**
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 5.255.455.870,-**dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV (Oktober 2021)sebesar **Rp. 4.009.645.422,-** atau **76,29 %** dengan target realisasi Kinerja sebesar **100 %**.

Alokasi Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran sampai Oktober Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Triwulan IV(Oktober) Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
I.	PENDAPATAN	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000,00	100%
	1. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 500.000.000	Rp 391.020.000	78 %

II.	BELANJA			Rp 8.787.823.570	Rp 6.735.589.236	76,65 %
III.	BELANJA PEGAWAI			Rp 3.405.647.700	Rp 2.619.543.814	76,92 %
	1.	GAJI		Rp 1.988.941.000	Rp 1.663.315.744	86,63 %
	2.	Tambahkan penghasilan berdasarkan prestasi kerja		Rp 1.416.706.700	Rp 956.228.070	67,50 %
VI.	BELANJA BARANG DAN JASA			Rp 5.255.455.870	Rp 4.009.645.422	76,29 %

Dari tabel 3.2 tergambar bahwa disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menjadi salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp. 500.000.000,-** dan telah terealisasi hingga bulan Oktober 2021 sebesar **Rp. 391.020.000,-** atau **78 %**, ini menunjukkan kinerja dan pencapaian target yang baik, hal ini diakibatkan oleh pihak perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang mayoritas menyeter retribusi menara dan telekomunikasi di akhir tahun 2021 atau pada triwulan IV tahun 2021.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada upaya menunjang pelaksanaan tugas pembangunan di bidang komunikasi dan informatika diarahkan kepada peningkatan kualitas infrastruktur Jaringan Interkoneksi antar perangkat daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sumber daya manusia (SDM), sehingga tercipta aparatur yang mampu menangani masalah-masalah komunikasi dan informatika secara kompeten dan profesional, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders*, sehingga akan terwujud program yang bersinergi, upaya peningkatan pelayanan publik yang berpengaruh terhadap pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan peran kelembagaan/instansi untuk memperoleh dukungan anggaran agar program-program kerja dan kegiatan dapat terealisasi.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni **“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024”** (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 5 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 4 program pokok yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo dan di implementasikan didalam Rencana Kerja dan merupakan hasil mapping (pemetaan) berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan dari penyusunan renja tahun sebelumnya, adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Rutin / Penunjang antara lain :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

I.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Mebel
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 23. Penyediaan Jasa Komunikasi
- 24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

11.8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 28. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 29. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 30. Pelayanan Informasi Publik
- 31. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas
- 32. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- 33. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 34. Layanan Hubungan Media
- 35. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 36. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 37. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

11.9. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 38. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

11.10. Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 39. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

40. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
41. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
42. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
43. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
44. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

IV.11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota

45. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

V.12. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

46. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
47. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 terdiri 5 (Lima) program, 12 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel tc.33 sebagai berikut :

Tabel TC. 33

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Sesuai KEPEMENDAGRI 050-5889/2021

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	DISKOMINFO	100%	6.676.791.071	APBD		100%	6.907.791.071
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	DISKOMINFO	65 Kategori	126.920.000	APBD		70 Kategori	126.920.000
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	DISKOMINFO	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</i>	DISKOMINFO	5 Laporan	61.920.000	APBD		5 Laporan	61.920.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							
3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	DISKOMINFO	4 Laporan	35.000.000	APBD		4 Laporan	35.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun	DISKOMINFO	100%	4.094.444.149	APBD		100%	4.194.444.149
4	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	DISKOMINFO	26 Orang/Bulan	3.853.594.149	APBD		29 Orang/Bulan	3.948.594.149
5	<i>Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	DISKOMINFO	12 Dokumen	155.000.000	APBD		12 Dokumen	160.000.000
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	DISKOMINFO	2 Laporan	45.850.000	APBD		2 Laporan	45.850.000
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	DISKOMINFO	3 Laporan	40.000.000	APBD		3 Laporan	40.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISKOMINFO	100%	112.000.000	APBD		100%	112.000.000
8	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	DISKOMINFO	60 Paket	27.000.000	APBD		60 Paket	27.000.000
9	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	DISKOMINFO	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3 Dokumen	35.000.000
10	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	DISKOMINFO	10 Orang	50.000.000	APBD		10 Orang	50.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	DISKOMINFO	100%	898.926.922	APBD		100%	949.926.922
11	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	8 Paket	5.000.000	APBD		8 Paket	5.000.000
12	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	50 Paket	60.000.000	APBD		50 Paket	35.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	2 Paket	20.000.000	ABPD		2 Paket	25.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISKOMINFO	8 Paket	21.926.922	ABPD		8 Paket	21.926.922
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISKOMINFO	7 Dokumen	7.000.000	ABPD		8 Dokumen	8.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	12 Laporan	755.000.000	ABPD		12 Laporan	825.000.000
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISKOMINFO	12 Dokumen	30.000.000	ABPD		12 Dokumen	30.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	100%	745.000.000	APBD		100%	810.000.000
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	15 unit	100.000.000	APBD		15 unit	150.000.000
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISKOMINFO	20 Unit	45.000.000	APBD		25 Unit	60.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	1 Unit	400.000.000	ABPD		1 Unit	400.000.000
21	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	20 Unit	200.000.000	ABPD		20 Unit	200.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	DISKOMINFO	100%	119.500.000	ABPD		100%	124.500.000
22	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	DISKOMINFO	12 Laporan	4.500.000	APBD		12 Laporan	4.500.000
23	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	12 Laporan	80.000.000	APBD		12 Laporan	85.000.000
24	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	DISKOMINFO	12 Laporan	35.000.000	ABPD		12 Laporan	35.000.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	DISKOMINFO	100%	580.000.000	ABPD		100%	590.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas</i>	DISKOMINFO	19 Unit	145.000.000	ABPD		20 Unit	150.000.000
26	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	DISKOMINFO	22 Unit	35.000.000	APBD		30 Unit	40.000.000
27	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	DISKOMINFO	1 Unit	400.000.000	APBD		1 Unit	400.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
II.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	DISKOMINFO	4 Media	10.180.000.000	APBD		4 Media	10.180.000.000
II.8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	DISKOMINFO	4 Media	10.180.000.000	APBD		4 Media	10.180.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	55.000.000	APBD		4 Dokumen	55.000.000
29	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	45.000.000	APBD		4 Dokumen	45.000.000
30	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
31	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	DISKOMINFO	4 Dokumen	55.000.000	APBD		4 Dokumen	55.000.000
32	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	10 Dokumen	150.000.000	APBD		10 Dokumen	150.000.000
33	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	3 Dokumen	138.450.000	APBD		3 Dokumen	138.450.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	DISKOMINFO	4 Layanan	8.716.550.000	APBD		4 Layanan	8.766.550.000
35	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	DISKOMINFO	500 Dokumen	700.000.000	APBD		500 Dokumen	700.000.000
36	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	7 Unit	150.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000
37	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	DISKOMINFO	8 Orang	120.000.000	APBD		8 Orang	120.000.000
III.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	DISKOMINFO	44 Unit	4.085.050.000	APBD		44 Unit	4.088.650.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000
38	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000
III.10	Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	DISKOMINFO	44 Unit	585.050.000	APBD		44 Unit	588.650.000
39	<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan</i>	DISKOMINFO	44 Dokumen	200.000.000	APBD		44 Dokumen	200.000.000
40	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	DISKOMINFO	44 Unit	46.850.000	APBD		44 Unit	46.850.000
41	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i>	DISKOMINFO	13 Perangkat Daerah	47.700.000	APBD		13 Perangkat Daerah	47.700.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	DISKOMINFO	5 Unit	125.000.000	APBD		5 Unit	125.000.000
43	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	DISKOMINFO	12 Dokumen	99.100.000	APBD		12 Dokumen	99.100.000
44	<i>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	DISKOMINFO	12 Dokumen	66.400.000	APBD		12 Dokumen	70.000.000
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
IV.11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
45	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	250.000.000	APBD		4 Dokumen	250.000.000

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Sektoral</i>							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</i>	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
V.12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat keamanan informasi pemerintah</i>	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
46	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	DISKOMINFO	44 Perangkat Daerah	100.000.000	APBD		44 Perangkat Daerah	100.000.000
47	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	DISKOMINFO	13 Laporan	100.000.000	APBD		13 Laporan	100.000.000
	JUMLAH TOTAL				Rp 21.391.841.071,00				Rp 21.626.441.071,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Renja 2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Akhir Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kuala Tungkal, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SOFIAN KADRY, S.Kom.M.Si

Pembina

NIP.19870525 201001 1 004